

## Pendekatan Pendidikan Dalam Pelestarian Pusaka Kota

Mutiawati Mandaka<sup>1)</sup>, Laretna Trisnantari Adhisakti<sup>2)</sup>

Program Studi Arsitektur Universitas Pandanaran Semarang<sup>1)</sup>

Program Studi Arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>[mutia.mandaka@unpand.ac.id](mailto:mutia.mandaka@unpand.ac.id)

<sup>2)</sup>[laretna@ugm.ac.id](mailto:laretna@ugm.ac.id)

---

### Abstract

The preservation of urban heritage is a challenge for the current generation in the face of changes associated with globalization. Preserving this city's heritage is considered important to be able to maintain the existing identity or cultural values. The purpose of this paper is to find out how the role of education in the preservation of urban heritage is. The method used in this research is descriptive qualitative. Literature study is used to obtain matters related to preservation, based on 8 instruments for structuring and preserving urban heritage, then connecting or integrating between heritage conservation and urban planning and design associated with educational activities. The results of the study illustrate how educational activities have an important role in preserving the city's heritage. Things that can be done to carry out conservation in the world of education, among others, early planting of heritage education through picture books or comics that tell the history or culture of an area, incorporating preservation materials into the undergraduate education curriculum, creating a competency framework (UNESCO) as a reference in the world of education at postgraduate, teachers as educators as well as facilitators are strengthened in their role to shape the character of children who love the heritage of the city, a competency-based approach can be done through formal and informal education. It is hoped that the educational approach in structuring and managing urban heritage is able to educate the current generation to be able to learn and appreciate the valuable relics of the past.

**Keywords:** heritage city, framework, competence, education, preservation

### ABSTRAK

Pelestarian pusaka kota merupakan tantangan untuk generasi sekarang dalam menghadapi perubahan yang terkait dengan globalisasi. Melestarikan pusaka kota ini dianggap penting untuk dapat tetap mempertahankan eksisting identitas atau nilai-nilai budaya yang ada. Tujuan paper ini untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan dalam pelestarian pusaka kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kajian literatur digunakan untuk mendapatkan hal-hal terkait dengan pelestarian, didasari dari 8 instrumen penataan dan pelestarian pusaka kota selanjutnya menghubungkan atau mengintegrasikan antara pelestarian pusaka dan perencanaan serta perancangan kota dikaitkan dengan aktivitas pendidikan. Hasil dari penelitian menggambarkan bagaimana aktivitas pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pelestarian pusaka-pusaka kota. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pelestarian dalam dunia pendidikan, antara lain penanaman sejak dini edukasi pusaka melalui buku bergambar atau komik yang menceritakan sejarah atau budaya satu daerah, memasukkan materi pelestarian kedalam kurikulum pendidikan tingkat sarjana, membuat kerangka kerja kompetensi (UNESCO) sebagai acuan di dunia pendidikan pada Pascasarjana, guru sebagai pendidik sekaligus fasilitator diperkuat perannya untuk membentuk karakter anak yang cinta pada pusaka kota, pendekatan berbasis kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal. Diharapkan dari pendekatan pendidikan dalam penataan dan pengelolaan pusaka kota mampu mendidik generasi sekarang untuk dapat belajar dan menghargai peninggalan-peninggalan yang berharga di masa lampau.

Kata kunci : kota pusaka, kerangka kerja, kompetensi, pendidikan, pelestarian

Info Artikel :

Masuk: 12 April 2021 Revisi : 7 Mei 2021 Diterima : 6 Juni 2021 Terbit : 30 Juni 2021

### Pendahuluan

Peninggalan-peninggalan bersejarah suatu kota merupakan hal yang menarik untuk dikunjungi. Dalam peninggalan-peninggalan tersebut terdapat nilai-nilai historis yang dapat dijadikan pengetahuan bagi generasi saat ini. Akan sangat disayangkan apabila peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut tidak dapat dilestarikan atau hilang begitu saja.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pusaka budaya yang patut dilestarikan. Untuk dapat melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut baik fisik (*tangible*) maupun non fisik (*intangible*) maka dapat dilakukan dengan pendekatan penataan dan pelestarian. Berdasarkan *Charta for Heritage Cities Conservation* atau Piagam Pelestarian Kota Pusaka tahun 2013 ada 8 instrumen penataan dan pelestarian kota Pusaka yaitu: (1) *Institution and management of Heritage Cities* (Tata Kelola dan Kelembagaan), (2) *Heritage Inventory and Documentation* (Inventarisasi aset Pusaka), (3) *Information, Education, and Promotion of the Heritage City* (Informasi, Pendidikan, dan Promosi Kota Pusaka), (4) *The Heritage City Economy* (Ekonomi Kota Pusaka), (5) *The Heritage City Disaster Risk Management* (Manajemen penanggulangan bencana Kota Pusaka), (6) *Development of Community Cultural Life* (Pengembangan Masyarakat Kreatif), (7) *The Heritage City Spatial Planning, Facilities and Infrastructure* (Perencanaan dan Penataan Ruang Kota Pusaka), (8) *The Heritage City Design Management* (Olah Desain Bentuk Kota Pusaka). Selanjutnya bagaimanakah pendidikan merespon pengelolaan pusaka kota yang ada. Dari 8 instrumen penataan dan pelestarian Kota Pusaka, satu tema terkait dengan pendidikan (nomor tiga dari 8 instrumen

penataan dan pelestarian kota pusaka) akan diangkat sebagai bagian dari usaha menata dan melestarikan kota-kota Pusaka.

### Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelestarian merupakan: 1) teknik, cara, kegiatan melestarikan; 2) kegiatan melindungi dari aktivitas dari kemusnahan atau kerusakan; pengawetan; konservasi; 3) kegiatan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan keunggulan nilai dan keanekaragamannya. Papageorgeou (1971) dalam Widayati (2003) menjelaskan kawasan bersejarah terdiri dari empat yaitu: (1) Bangunan dan blok bangunan, (2) area kecil pedesaan sebagai pusat sejarah, (3) *historical cities*, (4) *historical area* pada kotabesar. Menurut Kurniawan dan Suwandono (2015) pelestarian adalah cara yang dilakukan untuk bisa melingkupi dan mempertahankan bangunan, monumen, dan lingkungan tersebut dari rusaknya keadaan saat ini dan pencegahan kerusakan di masa depan. Dan berdasarkan Adhisakti (2021) dalam diktat perkuliahan Pelestarian Pusaka Kota, pelestarian merupakan usaha mengelola pusaka melalui aktivitas perlindungan, penelitian, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan secara hati-hati agar tetap terjaga keberlangsungan, keserasian dan suportnya untuk mengantisipasi perubahan jaman agar dapat menciptakan kehidupan bangsa yang memiliki nilai terbaik. Sehingga pelestarian dapat disimpulkan merupakan suatu cara atau usaha yang dikerjakan untuk dapat melingkupi dan melindungi bangunan, monumen, dan lingkungan dari kehancuran melalui aktivitas perlindungan, penelitian, pemeliharaan, pemanfaatan, dan daya dukungnya dalam menanggapi era

globalisasi untuk menciptakan kehidupan bangsa yang lebih bermutu dan bermartabat.

Pelestarian biasanya difungsikan untuk mempertahankan monumen, bangunan, dan lingkungan dimana terdapat budaya dan sejarah atau keunggulan nilai arsitektural dari kemusnahan secara periodik (cepat maupun lambat) (Budiharjo, 1997).

Pelestarian bukan hanya yang berelevansi dengan bangunan dan lokasi sejarah, namun juga seluruh lokasi dan bangunan yang ada selama mereka secara ekonomi merupakan bagian yang penting dan dari sisi budaya memiliki nilai istimewa.

#### **Pusaka Kota**

Arti kata pusaka menurut KBBI adalah: 1) aset harta peninggalan orang yang telah wafat; warisan; 2) harta yang diturunkan dari pendahulu. Berdasarkan kamus Poerwadarminto dalam (L. Adishakti, 2009) pusaka berarti *heritage* atau warisan. Selanjutnya Adhisakti (L. T. Adishakti, 2016) menyebutkan bahwa pusaka adalah warisan masa lampau yang mempunyai kualitas sejarah, baik berisi pemikiran, keunikan konsep dan penyusunannya, kedudukannya sangat krusial untuk keberlanjutan hidup manusia. Sehingga pusaka dapat dimaknakan sebagai warisan atau warisan masa lampau yang memiliki nilai sejarah, baik berisi pemikiran, keunikan konsep dan penyusunannya, kedudukannya sangat krusial untuk keberlanjutan hidup manusia.

Di Indonesia sendiri kesepakatan tentang Pusaka Indonesia telah dicetuskan pada tahun 2003 melalui Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia yang bekerjasama dengan ICOMOS dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Deklarasi Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia tahun 2003 menyetujui hal-hal yang berhubungan dengan etika dan moral pelestarian pusaka. Hal-hal yang ada dalam persetujuan tersebut yaitu Pusaka Indonesia adalah pusaka alam (*natural heritage*), pusaka budaya (*cultural heritage*) dan pusaka saujana. Pusaka alam atau *natural heritage* merupakan alam yang terbentuk secara

khas atau unik. Bentuk-bentuk secara alami tersebut memiliki ciri yang khas, memiliki korelasi dan selalu meningkat. Sedangkan pusaka budaya atau *cultural heritage* merupakan pusaka budaya yang berasal dari hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang khas yang dipunyai lima ratus suku bangsa di Indonesia, secara individu, atau sebagai kesatuan bangsa Indonesia dan ada hubungannya dengan budaya lain sepanjang sejarah eksistensinya.

Pusaka sendiri dapat diartikan sebagai saujana, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sejauh pandangan mata. Saujana ini mencakup pusaka alam dan pusaka budaya. Dalam perkembangannya pusaka budaya dibagi menjadi pusaka ragawi (*tangible*) dan pusaka budaya tak ragawi (*intangible*). Pusaka ini menyangkut banyak hal antara lain terkait dengan pengelolaan wilayah, desa hingga kota, pengelolaan seni budaya, dan lain-lain.

Berdasarkan *Charta for Heritage Cities Conservation* atau Piagam Pelestarian Kota Pusaka tahun 2013, instrumen penataan dan pelestarian kota pusaka terdiri dari delapan point yaitu:

#### 1. *Institution and management of Heritage Cities*

Tata kelola dan kelembagaan yang dimiliki oleh kota pusaka terdiri dari pihak swasta, masyarakat dan juga pemerintah beserta kelengkapannya. Dalam hal ini kelembagaan juga perlu didukung dengan tujuan agar adanya usaha meningkatkan sumber daya manusia, beserta satuan hukum dan mekanisme penerapannya.

#### 2. *Heritage Inventory and Documentation*

Aset-aset pusaka harus diinventarisasikan dengan baik, secara menyeluruh dan tersistem. Hasil dari penyimpanan atau pendataan aset ini harus diikuti dengan analisa yang cukup penting, dimana nanti hasilnya ditata dalam dokumentasi yang bisa dilihat oleh semua orang tanpa kecuali.

#### 3. *Information, Education, and Promotion of the Heritage City*

Dalam pengelolaannya kota pusaka membutuhkan sistem informasi baik dalam bentuk Galeri yang mampu disentuh masyarakat maupun secara digital.

Tujuannya antara lain agar orang lain dapat mengakses dengan mudah, mempelajari, menyukai dan juga melestarikan pusaka.

#### 4. *The Heritage City Economy*

Ekonomi kota pusaka dimaksudkan agar agar selain kota pusaka mampu mengembangkan pusaknya sebagai sumberdaya yang dilestarikan, juga diharapkan mampu diperluas dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kerjasama antara pemerintah, swasta dan peran serta masyarakat maka akan lebih optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

#### 5. *The Heritage City Disaster Risk Management*

Adanya ancaman bencana setiap waktu menjadikan kota pusaka sendiri harus mampu ditanggulangi secara baik. Pengelolaan resiko bencana untuk kota pusaka mencakup kegiatan penanggulangan bencana yang terdiri dari tahap kesiagapan, tanggap darurat dan juga bagaimana proses pemulihan yang terkandung dalam kebijakan dan tata kelola pelestarian kota pusaka.

#### 6. *Development of Community Cultural Life*

Pemahaman, kecintaan, dan apresiasi pada nilai-nilai budaya merupakan basis penting dalam pelestarian pusaka. Pengembangan kehidupanbudaya masyarakat yang kreatif akan memberikan warna karya-karya baru yang menyerap nilai-nilai sekaligus kearifan pusaka.

#### 7. *The Heritage City Spatial Planning, Facilities and Infrastructure*

Dalam mengelola kota pusaka perencanaan dan penataan ruang harus memiliki kebijakan khusus seperti RTRW, RDTR, PZ, RTBL dan juga hal-hal yang mengancam dan mengganggu pusaka kota. Dibutuhkan juga ruang khusus untuk keberlanjutan keunggulan nilai-nilai pusaka yang dimiliki.

#### 8. *The Heritage City Design Management*

Olah desain bentuk kota pusaka merupakan strategi kreatif dan inovatif untuk keberlanjutan kota pusaka tanpa merusak nilai-nilai pusaknya. Olah desain bentuk kota pusaka ini merupakan bagian yang sejajar dengan olah fungsi dan

pengembangan kehidupan budaya masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan vitalitas kawasan dan menjaga keserasiannya.

#### **Membangun Model Pendidikan Pusaka**

Pengelolaan Pusaka dalam piagam kota pusaka Indonesia tahun 2013 menyebutkan ada delapan point instrumen penataan dan pelestarian kota pusaka dan point ke-3 menekankan terkait dengan informasi, pendidikan, dan promosi kota pusaka. Mengutip Prof. Wuryadi dalam Wijoyono & Adhisakti (2010) pada acara *training* pendidikan pusaka yang diperuntukan bagi guru SD bertempat di hotel Galuh Prambanan:

“Penghargaan merupakan modal untuk melakukan pelestarian. Tanpa pendidikan upaya pelestarian akan berakhir. Pendidikan tanpa akar budaya akan tidak bermakna dan tanpa warna. Jika pendidikan di Indonesia tidak dibawa dan dilestarikan dengan akar budaya yang dimiliki, maka hal tersebut akan sangatlah disayangkan”.

Salah satu negara yang sudah mempunyai memiliki kompetensi pengelolaan pusaka yang bagus yaitu Belanda, telah menciptakan program pendidikan pusaka secara lokal yang dalam prosesnya melibatkan lembaga swadaya masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Strategi yang dilakukan terus digali dan dipantau agar mampu optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penerapan contoh pendidikan pusaka di sekolah dasar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat hal-hal yang perlu ditinjau dalam pengelolaan pendidikan pusaka yaitu:

##### 1. Manajemen Program

Manajemen program lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat pelaksanaan teknis dan operasional seperti:

##### a. Sosialisasi

Langkah awal melakukan pengelolaan program adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, dan ditujukan untuk kelompok seperti sekolah, masyarakat umum, dan pemerintah. Dalam melakukan sosialisasi perlu melibatkan

kelompok, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat.

b. Pelatihan atau Persiapan

Guru merupakan agen pendidikan pusaka yang utama, sehingga pelatihan atau persiapan yang dilakukan ditujukan kepada guru dan kepala sekolah. Guru sebagai pelaksana program pelatihan pusaka sedangkan kepala sekolah sebagai penentu kebijakan program di sekolah yang dipimpinnya. Langkah pelatihan perlu dilakukan setelah langkah sosialisasi dilaksanakan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan program dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan ketentuan Departemen Pendidikan Nasional seluruh Indonesia. Pelaksanaan program ini dilangsungkan setiap semester dan dilakukan evaluasi untuk kualitas dan keberlanjutannya.

d. Pendampingan

Pendampingan secara langsung merupakan hal penting untuk guru-guru karena keterbatasan bahan dan peraga pendidikan pusaka yang tidak lengkap di masing-masing sekolah. Setelah itu guru dipantau secara aktif oleh tim pendidikan pusaka dengan melakukan kunjungan langsung atau memanfaatkan teknologi informasi. Dengan data *base* yang cukup lengkap dalam sebuah sistem pusat sumberdaya yang berisi dokumen-dokumen dan rujukan yang dapat menjadikan sebuah pendampingan mandiri.

e. Monitoring dan Evaluasi

Hal ini dikerjakan secara rutin, tidak hanya pada akhir program. Untuk monitoring dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan sarana perubahan informasi yang sudah dibuat pada <http://pendidikanpusaka.org> dan dilakukan dengan kunjungan langsung ke lapangan. Selanjutnya untuk evaluasi, yang ditekankan adalah dampak dari pelaksanaan program yang telah berjalan selama satu semester terutama kepada siswa peserta program, guru, dan juga masyarakat yang terkena efek dari kegiatan pendidikan pusaka.

2. Muatan Program

Muatan Program melingkupi isi dan kualitas aktivitas yang dilaksanakan dalam operasional program. Muatan program terdiri dari kegiatan:

a. Materi Sosialisasi

Materi ini berisikan mengenai pengenalan dan pemahaman terkait konsep pusaka, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan terkait konsep pelestarian. Harapan yang ingin yang dicapai adalah peserta mampu memahami kerangka dasar dari semua program pendidikan pusaka.

b. Materi Pelatihan (buku panduan)

Materi pelatihan atau buku pedoman yang digunakan para guru dibangun oleh Tim Pendidikan Pusaka untuk level nasional dan level lokal. Buku panduan ini menjadi panduan prinsip umum yang digunakan di seluruh Indonesia, kemudian disempurnakan dengan beberapa buku panduan yang bersifat lokal sesuai dengan potensi pusaka setempat. Sehingga kedepannya buku panduan ini dapat menjadi pegangan para guru untuk dapat menerapkan program pendidikan pusaka di lapangan.

c. Materi Pendampingan (buku panduan atau bacaan)

Materi pendampingan atau buku bacaan perlu untuk dilakukan juga untuk menunjang program pendidikan pusaka. Cover buku dibuat semenarik mungkin yang dapat menggugah anak untuk membaca dalam bentuk komik atau cerita bergambar, dan beberapa macam tokoh binatang tetap digunakan. Seperti yang telah diterapkan di Yogyakarta, menurut siswa yang turut berperan dalam evaluasi penggunaan buku Seri Pendidikan Pusaka, bahwa buku cerita bergambar, komik, dan buku tokoh binatang merupakan hal yang membuat mereka tertarik untuk membaca.

d. Materi Monitoring dan Evaluasi

Materi monitoring dan evaluasi meliputi dua hal yaitu ranah pengelolaan program (hal yang berhubungan dengan agenda dan implementasi aktivitas di tingkat manajerial) dan ranah muatan program (terkait isi kegiatan). Hasil monitoring dan evaluasi diarsipkan oleh Tim Pendidikan Pusaka. Selanjutnya hasil dokumentasi tersebut disimpan di beberapa media seperti <http://pendidikanpusaka.org>

sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat umum bila ingin menerapkan pendidikan pusaka.

#### **Pendidikan untuk Pelestarian**

Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) menganggap bahwa pendidikan merupakan salah satu fokus untuk melestarikan pusaka yang jumlahnya sangat beragam. Melalui guru yang dianggap sebagai agen pelestarian pusaka, diharapkan kecintaan terhadap warisan pusaka sudah mulai mengena sejak dini. Dengan merencanakan generasi penerus yang mempunyai apresiasi dan interpretasi kelestarian pusaka selama mereka menjalankan pendidikan formal, semoga bisa menghasilkan anak-anak yang memiliki berkarakter atau menjadi manusia seutuhnya. Kesuksesan kelestarian pusaka bangsa dapat dilihat pada keberhasilan pendidikan formal pada tingkat dasar, menengah dan seterusnya sehingga anak akan membentuk karakter dirinya berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Guru sebagai pendidik juga akan terus diperkuat perannya melalui berbagai pelatihan dan kompetensi untuk membentuk karakter anak yang cinta pada pusaka kota.

Banyak kemampuan dan kekayaan pusaka budaya, pusaka alam dan saujana yang bisa dengan mudah dijumpai disekitar kita, dan sewajarnya seharusnya menyadarkan kita bahwa hal tersebut harus dilestarikan. Dalam hal ini tidak hanya masyarakat yang menyandang peran penting, namun para pemangku kepentingan juga diharapkan mampu berperan aktif untuk pelestarian tersebut. Ada banyak hal yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya yaitu strategi yang dilakukan adalah menggabungkan pendidikan pusaka kedalam ranah pendidikan sekolah.



Gambar 1 Komentar salah satu warga terkait dengan keberlanjutan situs bersejarah di Indonesia  
Sumber: (Wijoyono, 2015)

#### **Pendekatan Kompetensi dalam Pengelolaan Pusaka Kota**

Tuntutan kontemporer atas praktisi warisan budaya membutuhkan kotak peralatan baru yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk personel di semua tingkatan, dari pembuat kebijakan hingga pekerja di garis depan. Oleh karena itu UNESCO mencoba menggeser paradigma pengelolaan heritage jauh dari melestarikan keingintahuan dalam kotak kaca menuju yang lebih komprehensif dan pendekatan berkelanjutan. Krisis seperti perubahan iklim dan pandemi Covid 19 sudah menjadikan tantangan bagi situs warisan budaya dan komunitas terkaitnya. Selain itu, komitmen yang tertuang dalam Agenda UNESCO 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan menyerukan pandangan yang lebih strategis dalam pengelolaan warisan budaya dimana warisan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan secara fundamental. Perluasan cakupan masalah konservasi yang sempit menuju ke tujuan yang berpandangan jauh ke depan untuk keberlanjutan memiliki implikasi bagaimana situs warisan budaya dikelola. UNESCO mengeluarkan kerangka kerja kompetensi untuk pengelolaan warisan budaya sebagai panduan keterampilan dan

pengetahuan penting untuk praktisi warisan.

#### 1. Pengertian Kompetensi

Pengertian kompetensi menurut Appleton, MR 2016 adalah kemampuan yang telah terbukti untuk melakukan suatu pekerjaan, dan sering kali didefinisikan dalam istilah yang dibutuhkan yaitu kombinasi keterampilan, pengetahuan dan sikap.



Gambar 2. Ketiga komponen kompetensi  
Sumber: (Bienstman et al., 2020)

Selanjutnya kompetensi juga didefinisikan sebagai kombinasi dari pengetahuan dan keterampilan bersama dengan pengalaman yang memungkinkan *conservator-restore* profesional untuk memberikan pekerjaan secara konsisten dan secara bertanggungjawab (ECCO, 2011). Menurut buku pegangan *Asean Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* edisi kedua menyatakan bahwa acuan kompetensi menetapkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk kinerja yang sukses di tempat kerja dan yang dibutuhkan acuan kinerja. Berdasarkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) (2016) rancangan dasar kompetensi...adalah bahwa kompetensi berfokus pada apa yang dicita-citakan dari seorang pegawai di lokasi kerja daripada pada sistem pembelajaran atau waktu yang dihabiskan di training atau pendidikan.

#### 2. Kerangka Kompetensi

Menurut Appleton (2016), daftar kompetensi global untuk praktisi kawasan konservasi: direktori komprehensif dan panduan pengguna untuk keterampilan,

pengetahuan dan kualitas pribadi yang dibutuhkan oleh manajer, staf dan pengurus kawasan lindung dan kawasan lindung lainnya, dikembangkan oleh *International Union for Conservation of Nature's World Commission on Protected Area (IUCNWCPA)*, berfungsi sebagai referensi utama untuk mengembangkan kerangka kerja kompetensi untuk pengelolaan warisan budaya. IUCNWCPA Global Register adalah dokumen benchmark yang menetapkan standar kompetensi untuk praktisi kawasan lindung di seluruh dunia, provinsi dan lokal.

Berdasarkan kompetensi yang tercantum dalam kerangka kerja kompetensi, UNESCO mengembangkan seperangkat "Hasil Pembelajaran Akademik untuk Pendidikan Pascasarjana dalam Pengelolaan Warisan Budaya". Hasil pembelajaran ini akan menjadi referensi bagi pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan ketika menilai program pendidikan warisan mereka yang ada untuk perbaikan dan ketika mengembangkan program baru.

IUCWCPA Global Register berfungsi sebagai direktori komprehensif keterampilan, pengetahuan dan pribadi kualitas yang dibutuhkan oleh manajer, staf dan pengelola kawasan lindung dan kawasan konservasi lainnya (Appleton, 2016, p. i). Terdiri dari 300 kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan kawasan lindung, mencakup semua tingkatan praktisi yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, dari manajer hingga pekerja terampil. Daftar Global menetapkan empat tingkatan personel sebagai berikut:

- Tingkat 1 : Pekerja terampil
- Tingkat 2 : Manajer menengah atau spesialis teknis
- Tingkat 3 : Manajer senior
- Tingkat 4 : Eksekutif

Tingkatan kelima *unskilled worker* juga ditentukan namun tidak termasuk dalam register.

Daftar Global memiliki lima belas kategori kompetensi dalam tiga kelompok utama:

- Perencanaan, manajemen dan administrasi
- Kawasan lindung terapan pengelolaan

c. Pribadi umum kompetensi

Kerangka kompetensi akan melengkapi arus upaya peningkatan kapasitas di bidang pusaka, yang seringkali berfokus pada topik yang harus diajarkan kepada orang tetapi jarang menentukan hasil dalam hal pengetahuan apa yang harus diperoleh atau dalam hal kinerja aktual untuk pekerjaan tersebut. Kerangka kompetensi akan berfungsi sebagai patokan untuk merancang pengembangan kapasitas dan program pendidikan. Hal ini mendefinisikan hasil yang diinginkan untuk pelajar serta untuk berlatih profesional dalam melaksanakan pekerjaan mereka dengan standar yang diperlukan.

Kerangka kerja kompetensi untuk manajerial pusaka budaya mengadopsi empat tingkat register global sebagai berikut:

1. Level 1 Pekerja terampil (*skill worker*)
2. Level 2 Manajer menengah atau spesialis teknis (*middle manager technical specialist*)
3. Level 3 Manajer senior (*senior manager*)
4. Level 4 Eksekutif (*executive*)

Kerangka ini memiliki dua belas kategori kompetensi yang terkait dengan pekerjaan pengelolaan warisan budaya dalam empat kelompok utama:

1. Kompetensi Inti (*core*)
2. Kompetensi Manajerial (*managerial*)
3. Kompetensi Pribadi (*personal*)
4. Kompetensi Teknis Khusus (*specialized*)

Lima kompetensi Inti adalah:

1. *Applying Laws and Regulation* (menerapkan hukum dan peraturan)
2. *Heritage policy, Principles processes and Etichs* (kebijakan, prinsip, proses, dan etika warisan)
3. *Community, Rights, and Knowledge* (komunitas, hak, dan pengetahuan)
4. *Heritage education, and interpretation* (Pendidikan dan intepretasi pusaka)
5. *Sustainable development* (pembangunan berkelanjutan)

Lima kategori kompetensi Manajerial adalah:

1. *Organization governance, heritage planning and strategic management*

(Tata kelola organisasi, perencanaan pusaka dan manajemen strategis)

2. *Human Capital Management* (Manajemen sumber daya manusia)
3. *Financial and Operations Management* (Manajemen keuangan dan operasi)
4. *Information Management and Administration* (Manajemen informasi dan administrasi)
5. *Communication, Collaboration and Coordination* (komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi)

Dua kategori kompetensi pribadi umum adalah:

1. *Foundation Personal Competence* (kompetensi pribadi dasar)
2. *Advanced Personal Competences* (kompetensi pribadi tingkat lanjut)

Kerangka ini juga memberikan sejumlah contoh kompetensi teknis khusus di bawah beberapa bidang pekerjaan dalam pengelolaan warisan budaya, termasuk arsitektur, teknik dan perencanaan kota. Dapat dirangkum pada gambar 3 berikut:



Gambar 3. Tinjauan kerangka kompetensi  
Sumber: (Practitioners, 2020)

3. Pengguna Kerangka Kompetensi  
Kerangka kerja kompetensi merupakan alat yang digunakan oleh:

- a. Organisasi Manajemen Pusaka
- b. Staff manajemen pusaka individu, profesional pusaka, dan pengurus lokal
- c. Lembaga pendidikan dan pelatihan



Gambar 4. Pengguna Kerangka Kerja Kompetensi

Sumber: (Practitioners, 2020)

Kerangka kerja kompetensi dapat diterapkan oleh organisasi manajemen pusaka dengan cara sebagai berikut:

- 1) Untuk memilih kompetensi yang relevan dengan pekerjaan mereka
- 2) Digunakan sebagai tolak ukur untuk meninjau kinerja secara keseluruhan dan mengidentifikasi kesenjangan
- 3) Merancang strategi sumber daya manusianya
- 4) Untuk merencanakan atau menyesuaikan struktur kepegawaian
- 5) Untuk mengembangkan strategi atau rencana pengembangan kapasitas
- 6) Untuk meninjau kinerja staff
- 7) Untuk mendukung pengembangan dan promosi staff
- 8) Untuk memotivasi staff, dengan memberi mereka gagasan yang lebih jelas tentang kemungkinan jalur dan persyaratan karier
- 9) Untuk meningkatkan atau mereprofile staff yang ada
- 10) Untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk merekrut staf baru dan atau praktisi eksternal
- 11) Untuk membantu dalam membuat deskripsi pekerjaan

Sebuah organisasi manajemen pusaka dapat menggunakan kerangka kompetensi sebagai acuan mengidentifikasi ruang lingkup kompetensi yang dibutuhkan agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kompetensi yang dibutuhkan

akan tergantung pada jenis situs yang terlibat, konteks pengembangan dan mandat dari organisasi dan aktor yang terlibat dalam pengelolaan situs.

Kerangka kerja kompetensi juga dapat diterapkan pada individu, termasuk staf manajemen pusaka. Tidak diharapkan bahwa setiap individu akan menguasai semua kompetensi yang terkandung dalam kerangka kompetensi. Kompetensi yang relevan harus dipilih dari kerangkatergantungan pada jenis pekerjaan dan level individu. Untuk individu, kerangka kerja kompetensi dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Untuk penilaian diri sendiri
  2. Untuk mengidentifikasi kesempatan belajar yang sesuai
  3. Untuk merencanakan jalur karir
  4. Sebagai referensi untuk mengenali pembelajaran sebelumnya
  5. Untuk memfasilitasi mobilitas lintas batas
  6. Sebagai acuan dalam sertifikasi profesi
- Personel pusaka individu dapat menggunakan kerangka kompetensi untuk penilaian diri. Ini dapat membantu mereka untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam hal keterampilan dan pengetahuan, serta kesenjangan yang ada. Menanggapi penilaian diri tersebut, individu kemudian dapat mengidentifikasi dengan cara yang lebih bertarget dan strategis yang sesuai dengan kesempatan belajar. Individu dapat mengikuti dalam bentuk pelatihan in-house di tempat kerja mereka, melalui studi mandiri, melalui peluang pelatihan karir menengah atau melalui program gelar formal.

Kerangka kompetensi juga merupakan referensi berharga bagi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Desain program pendidikan dan pelatihan baru
- 2) Review program yang ada
- 3) Sebagai referensi untuk mengenali pembelajaran sebelumnya, yaitu untuk persyaratan masuk
- 4) Penilaian peserta didik
- 5) Dalam memfasilitasi mobilitas siswa

Banyak institusi pendidikan di kawasan Asia-Pasifik yang mengamati adanya

kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh lulusannya selama menempuh studi dengan kompetensi aktual yang dibutuhkan oleh pengusaha di dunia nyata. Ini juga berlaku untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pusaka. Situasi yang cukup bermasalah terutama di sektor pusaka karena banyak negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai program pendidikan dan pelatihan khusus untuk para profesional pusaka budaya. Contohnya sedikit sekali Fakultas dengan prodi Arsitektur yang menawarkan gelar khusus atau program sertifikat dalam arsitektur konservasi atau dalam konservasi arsitektur tradisional lokal. Kurangnya penawaran pendidikan dan pelatihan konservasi menyulitkan lulusan untuk memenuhi tuntutan tempat kerja. Dengan meningkatnya minat pada heritage selama dekade terakhir, lembaga pendidikan dan pelatihan mulai memberikan lebih banyak penawaran terkait dengan profesi ini. Kerangka Kerja Kompetensi dapat digunakan untuk memastikan bahwa kursus singkat, program sertifikat dangelar tersebut disesuaikan dengan kebutuhan profesi heritage, yang akan meningkatkan prospek karir lulusan serta kelangsungan jangka panjang program pendidikan dan pelatihan ini. Hal ini akan sangat berdampak dan berkontribusi untuk meningkatkan pengelolaan situs pusaka di wilayah tersebut.

#### 4. Penilaian

Kerangka kerja kompetensi dapat digunakan untuk tujuan penilaian, termasuk untuk:

1. Penilaian lembaga pengelolaan pusaka, melalui penilaian eksternal atau penilaian sendiri
2. Penilaian individu (praktisi dan siswa), melalui penilaian diri atau penilaian oleh atasan atau rekan atau pendidik atau bawahan

Jenis penilaian ada dua macam yaitu:

1. Penilaian Cepat, untuk penilaian cepat dimensi dua domain disarankan disini, seperti yang diperoleh dari Daftar Global:
  - a. Relevansi kompetensi

- b. Tingkat kompetensi (dinilai oleh individu atau atasannya, rekan sejawat, pendidik, bawahan dan atau asesor eksternal)

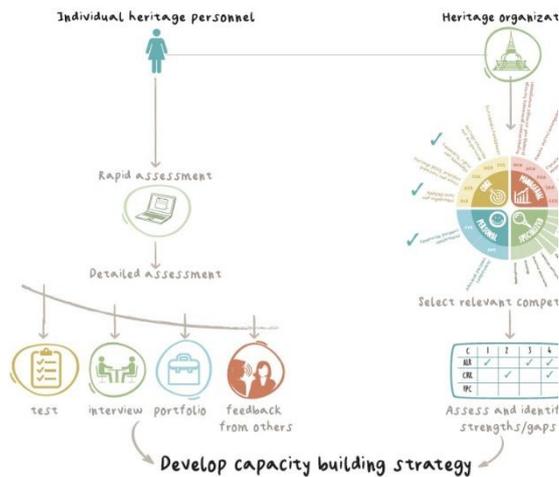
#### 2. Penilaian mendetail

Menurut (Appleton, 2016) IUCNWCPCPA Global Register menyarankan berbagai teknik yang dapat digunakan dalam menilai kompetensi individu, antara lain:

1. Tes Praktek, observasi dan simulasi. Kandidat melakukan tugas dalam kehidupan nyata atau situasi simulasi
2. Demonstrasi mendukung pengetahuan. Kandidat menunjukkan selama menyelesaikan tugas bahwa dia memiliki pengetahuan yang diperlukan
3. Umpan balik dari orang lain (supervisor, personel pengawas, peserta dalam acara, pemangku kepentingan, dan lain-lain)
4. Tes pengetahuan dan pemahaman lisan dan atau tertulis
5. Penilaian eksternal formal (misalnya laporan audit, tes pertolongan pertama)
6. Penyelesaian prosedur tertulis tertentu (misalnya mengisi buku catatan lapangan, menulis proposal hibah, atau menyusun rencana pengelolaan)
7. Akreditasi sebelumnya kualifikasi dan pengalaman
8. Portofolio sampel pekerjaan selesai
9. Wawancara

Teknik ini dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan teknik lain.

Jika penilaian mengarah ke sertifikasi normal, penilai bersertifikat mungkin diperlukan untuk melakukan penilaian, seperti halnya dengan program *the Western Indian Ocean-Certification of Marine Protected Area Professionals (WIO-COMPAS)*. Program ini merekrut ahli independen untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi yang ditentukan dengan skor 70 persen diperlukan di semua kompetensi sebagai ambang batas bagi kandidat untuk disertifikasi. Penilai harus memenuhi persyaratan kelayakan dan harus dilatih. Berikut merupakan opsi penilaian menggunakan kerangka kerja kompetensi:



Gambar 2 Strategi pengembangan peningkatan kapasitas  
Sumber: (Practitioners, 2020)

Terkait hal ini, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan termasuk lembaga pelatihan vokasi, dapat mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan standar kerja formal tersebut.

**Di tingkat regional dan internasional, kerangka ini dapat digunakan untuk menyelaraskan kerangka kerja kualifikasi profesional, pekerjaan dan pendidikan. Badan pengatur regional seperti ASEAN dan asosiasi profesional terkait pusaka dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi kerangka sebagai patokan untuk mendefinisikan keterampilan dan pengetahuan di sektor pusaka sambil menyusun perjanjian saling pengakuan yang memungkinkan mobilitas lintas batas bagi pekerja dan profesional.**

#### Metodologi

Menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan kajian literatur untuk mendapatkan hal-hal yang terkait dengan pelestarian, kemudian menggali informasi mengenai pusaka kota yang ada di Indonesia dan selanjutnya menghubungkan atau mengintegrasikan

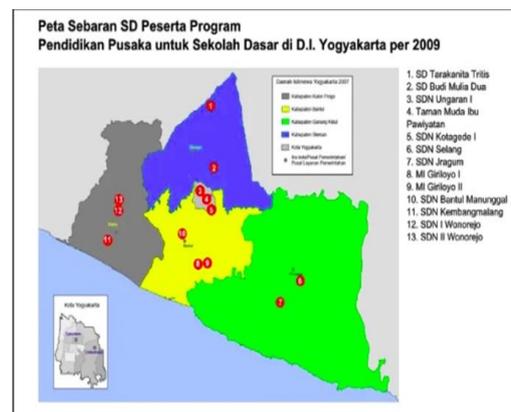
antara pelestarian pusaka dan perencanaan serta perancangan kota dikaitkan dengan aktivitas pendidikan.

#### Hasil Dan Pembahasan

Pemerintah sangat mendukung pengelolaan Kota Pusaka karena ada kekhawatiran dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup pesat, maka peninggalan budaya yang ada di Indonesia semakin tergerus. Oleh karena itu, harapan pemerintah di kemudian hari adalah Indonesia akan tumbuh berkembang pesat tanpa mengindahkan pertumbuhan kota-kota pusaka yang merupakan warisan luhur. Regulasi terkait pelestarian Kota Pusaka sudah ada dalam Undang-undang No 288 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

#### Pengelolaan Pendidikan Pusaka di Indonesia

Untuk strategi pengelolaan pendidikan Pusaka Kota dilakukan melalui jalur sekolah sudah mulai dilaksanakan di Yogyakarta. Pelaksanaannya sendiri dilaksanakan di beberapa sekolah dasar pada tahun 2009 sebagai bagian ujicoba yang telah berhasil. Ada sekitar 13 sekolah dasar di daerah Yogyakarta mengimplementasikan pendidikan pusaka di jalur sekolah formal.

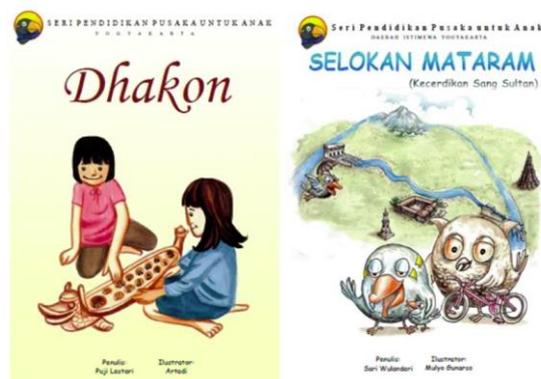


Gambar 7. Peta Sebaran SD Program Pendidikan Pusaka di Yogyakarta  
Sumber: (Wijoyono & Adhisakti, 2010)

Keberhasilan penerapan pendidikan pusaka di SD wilayah DIY ini tidak lepas

dari peran Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dan juga *support* dana dari Ergoed Nederland (EN) serta bantuan dari Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Puskur Depdiknas). Yogyakarta dipilih sebagai percontohnya mengingat kota ini terkenal sebagai kota pelajar. Diharapkan dengan keberhasilan ini menjadi acuan atau contoh model pengembangan yang dapat ditiru di tingkat nasional.

Guru sebagai fasilitator dalam penerapan pendidikan pusaka di sekolah diharuskan untuk mengagendakan tema yang kemudian ditulis menjadi buku. Setelah tema dipilih selanjutnya diserahkan kepada tim penyunting dan tim kreatif yaitu para ilustrator dan desainer grafis muda yang mengerjakan buku karya guru dan tim Pendidikan Pusaka BPPI. Hasilnya telah diproduksi sebanyak dua puluh satu buku berseri yang diperuntukkan untuk pendidikan pusaka khususnya untuk anak-anak yang diwujudkan dalam bentuk cerita bergambar atau komik.



Gambar 8. Contoh buku-buku pendidikan pusaka yang diperuntukkan untuk anak-anak

Sumber: (Wijoyono & Adhisakti, 2010)

Selanjutnya apabila dasar pendidikan pusaka untuk anak sudah mengena di masing-masing individu, perlu kiranya tetap ada keberlanjutannya di sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Upaya keberlanjutan itu ada di masing-masing perguruan tinggi, dan saat ini sudah masuk kedalam kurikulum perkuliahan. Namun dari semua perguruan tinggi, tidak semua memasukkan

pendidikan pusaka ini kedalam mata kuliah tetap yang wajib diambil dalam kurun waktu delapan semester. Ada yang memasukkan mata kuliah terkait dengan pendidikan pusaka, dan ada juga yang tidak.

Dari daftar kurikulum Program Studi Arsitektur yang ada di Institut Teknologi Bandung, dapat dilihat bahwa mata kuliah yang terkait dengan pendidikan pusaka ada di semester delapan dengan judul Pelestarian Bangunan dan Lingkungan. Mata kuliah ini bersifat wajib diambil pada saat studi, namun bobot perkuliahan ini masih minim yaitu hanya dua sks.

Berbeda dengan kurikulum di Program Studi Arsitektur di Universitas Indonesia, yang menempatkan mata kuliah yang terkait dengan pendidikan pusaka sebagai mata kuliah pilihan namun besar pada bobot satuan kredit semester.

Dari daftar mata kuliah yang ditawarkan di Prodi Arsitektur Universitas Indonesia, dapat dilihat dari bahwa mata kuliah yang terkait dengan pendidikan pusaka berada pada mata kuliah pilihan yang dapat diambil mahasiswa mulai dari semester lima sampai dengan semester delapan dengan nama mata kuliah Arsitektur Pusaka atau *Heritage Architecture* sebesar tiga sks.

Sama halnya dengan Prodi Arsitektur di Universitas Indonesia, di Prodi Arsitektur Universitas Gadjah Mada juga memasukkan pendidikan pusaka pada mata kuliah pilihan yang dapat diambil mulai dari semester empat sampai dengan semester tujuh. Walaupun tidak menjadi mata kuliah wajib pada kurikulum di Prodi Arsitektur UGM, namun mata kuliah ini banyak pilihannya dan lebih fokus ke aspek yang dikehendaki seperti pada mata kuliah pilihan *Urban Preservation and Conservation* yang memfokuskan materi terkait dengan pelestarian dan konservasi di area perkotaan saja dengan bobot dua sks, *Design for Architectural Heritage* yang menitikberatkan desain untuk Arsitektur Pusaka dengan bobot dua sks, *Conservation Techniques for Heritage District* yang menekankan pada teknik-teknik konservasi untuk kawasan Pusaka

juga dengan bobot dua sks, dan *Heritage City Conservation* yang lebih spesifik memperhatikan konservasi kota Pusaka dengan bobot dua sks.

Selanjutnya apabila mahasiswa akan melanjutkan studi lanjut mengambil master terkait dengan manajemen pusaka budaya, UNESCO telah mengembangkan hasil pembelajaran akademik untuk pendidikan Pascasarjana dalam Manajemen Pusaka Budaya. Menyadur dari kerangka kerja kompetensi untuk pengelolaan pusaka budaya yang diterapkan tidak hanya untuk para profesional dan organisasi warisan, tetapi juga dalam lingkungan akademik maka dikembangkanlah Hasil Pembelajaran Akademik dengan tujuan untuk membantu menyalurkan hasil pembelajaran lulusan program pengelolaan warisan budaya dengan keterampilan dan pengetahuan yang harus ditunjukkan oleh para profesional pengelolaan pusaka budaya secara kompeten di tempat kerja. Hasil pembelajaran dirancang khusus untuk tingkat master, karena sebagian besar program gelar yang ditujukan untuk menghasilkan profesional dalam pengelolaan warisan budaya di kawasan Asia-Pasifik.

Hasil Pembelajaran berasal dari kompetensi Inti dan kompetensi Manajerial dari kerangka kerja kompetensi. Dalam penyusunan dokumen ini, kerangka taksonomi *Bloom* dan pengetahuan, keterampilan dan sikap (KSA) digunakan. Oleh karena itu, dokumen mengidentifikasi “kata kerja tindakan” yang sesuai dari target kategori taksonomi dan KSA.

Penyusunan hasil pembelajaran akademik untuk pendidikan pascasarjana dalam manajemen pusaka budaya dimulai pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Universitas Tenggara (Cina) yang diadakan pada 3 dan 4 November 2018. Hasil Pembelajaran dikembangkan lebih lanjut melalui konsultasi ekstensif dengan universitas yang menawarkan kursus dalam pengelolaan warisan budaya di wilayah Asia-Pasifik, termasuk anggota jaringan Akademik Asia untuk

Manajemen Pusaka, bersama dengan badan dan pakar regional dan internasional di bidang warisan pusaka budaya termasuk ICCROM dan WHITRAP. Selanjutnya hasil pembelajaran secara resmi ditinjau pada pertemuan ahli yang diadakan oleh *National University of Singapore* pada 25 dan 26 Maret 2019 lalu dan oleh *University of Hongkong* pada 3 dan 4 Juni 2019.

Hasil pembelajaran akademik untuk pendidikan Pascasarjana dalam pengelolaan pusaka budaya dapat dilihat sebagai referensi untuk pembelajaran tingkat program program di lembaga pendidikan tinggi. Meskipun setiap program mungkin tidak dapat menggabungkan semua hasil pembelajaran dan masing-masing mungkin memiliki strategi yang berbeda mengenai jumlah dan sifat untuk mencapai hasil pembelajaran ini, dokumen ini dapat membantu institusi pendidikan tinggi dalam merancang program baru, meninjau program yang ada dalam menilai siswanya.

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan pendekatan pendidikan dalam pelestarian kota Pusaka dapat diambil kesimpulan antara lain berupa pendekatan pendidikan pusaka diharapkan mampu menjadi langkah penting untuk pelestarian pusaka, adapun penerapannya harus dilakukan dengan pendekatan dan metode tersistem. Untuk membangun program pendidikan pusaka secara nasional dalam prosesnya melibatkan lembaga swadaya masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pengelolaan pendidikan pusaka yaitu manajemen program (sosialisasi, pelatihan atau persiapan, pelaksanaan, pendampingan, dan monitoring dan evaluasi) dan muatan program (materi sosialisasi, materi pelatihan atau buku panduan, materi pendampingan berupa buku panduan atau bacaan, dan materi monitoring serta evaluasi). Keberhasilan kelestarian pusaka bangsa dapat dilihat pada keberhasilan pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah, dan seterusnya sehingga anak akan membentuk karakter

dirinya berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Guru sebagai pendidik harus diperkuat perannya melalui berbagai pelatihan dan kompetensi untuk membentuk karakter anak yang cinta pada pusaka kota. UNESCO mengeluarkan kerangka kerja kompetensi untuk pengelolaan pusaka budaya sebagai panduan keterampilan dan pengetahuan penting untuk praktisi pusaka. Untuk pendekatan berbasis kompetensi ini memungkinkan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui jalur non-formal atau informal, termasuk sistem transmisi tradisional seperti magang. Kerangka kerja kompetensi merupakan alat yang digunakan oleh organisasi manajemen pusaka, staff manajemen pusaka individu, profesional pusaka, dan pengurus lokal serta lembaga pendidikan dan pelatihan. UNESCO telah mengembangkan hasil pembelajaran akademik untuk pendidikan Pascasarjana dalam Manajemen Pusaka Budaya. Menyadur dari kerangka kerja kompetensi untuk pengelolaan pusaka budaya yang diterapkan tidak hanya untuk para profesional dan organisasi warisan, tetapi juga dalam lingkungan akademik maka dikembangkanlah Hasil Pembelajaran Akademik dengan tujuan untuk membantu menyelaraskan hasil pembelajaran lulusan program pengelolaan warisan budaya dengan keterampilan dan pengetahuan yang harus ditunjukkan oleh para profesional pengelolaan pusaka budaya secara kompeten di tempat kerja. Diharapkan dari pendekatan pendidikan dalam penataan dan pengelolaan kota Pusaka mampu mendidik generasi sekarang untuk dapat belajar dan menghargai peninggalan-peninggalan yang berharga di masa lampau.

#### Daftar Pustaka

- Adishakti, L. (2009). Tantangan kota pusaka indonesia. *Kongres I Jaringan Kota Pusaka Indonesia, October*, 12.
- Adishakti, L. T. (2016). *Pengantar pelestarian pusaka*.
- Appleton, M. . (2016). *A Global Register of Competences for Protected Area Practitioners*. IUCN/WWF.
- Bienstman, H., Chapagain, N. K., Imon, S. S., Kim, I., Leitao, L., & Unakul, M. (2020). *Competence Framework for Cultural Heritage Management: A Guide to the Essential skill and Knowledge for Heritage Practitioners*. United Nations Educational Scientific and Culture Organization.
- Budiharjo, E. (1997). *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Alumni.
- Kurniawan, N. A., & Suwandono, D. (2015). Upaya Pelestarian Kota Pusaka Kawasan Klampok, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara. *Upaya Pelestarian Kota Pusaka Kawasan Klampok, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara, 1*(3), 131–140. <https://doi.org/10.14710/ruang.1.3.131-140>
- Practitioners, H. (2020). *Competence Framework for Cultural Heritage*.
- Widayati, N. (2003). Strategi Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya. *Jurnal Kajian Teknologi, 6*(1), 49–57.
- Wijoyono, E. (2015). *Langkah Taktis Tanggap Darurat Cagar Budaya Yogyakarta*. 30 Desember. <https://elantowow.wordpress.com/2015/12/30/langkah-taktis-tanggap-darurat-cagar-budaya-yogyakarta/>
- Wijoyono, E., & Adhisakti, L. (2010). *Pendidikan Pusaka Untuk Anak*. 1 February 2010. <https://elantowow.wordpress.com/2010/02/01/pendidikan-pusaka-untuk-anak/>

kbbi.web.id